



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023



BALAI KIPM LAMPUNG

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRAKATA

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Lampung Tahun 2023 ini disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai KIPM Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode TA 2023 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Balai KIPM Lampung . Secara umum seluruh indikator kinerja Balai KIPM Lampung yang diukur pada Tahun 2023 ada yang telah mencapai bahkan melebihi target Tahun 2023. Capaian kinerja positif Balai KIPM Lampung Tahun 2023 antara lain adalah Efektivitas Sertifikasi Ekspor ikan dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (99%), Persentase Penyakit Ikan karantina yang dicegah penyebarannya anatar zona lingkup UPT Balai KIPM Lampung (100%),.Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan Ikan LIngkup Balai KIPM Lampung(100%).Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina yang Teridentifikasi Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (10 Lokasi).Persentase Pegawasan Pemasukan dan Pengeluaran jenis ikan yang dilarang,dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Balai KIPM Lampung (100%). Lokasi sebaran Jenis Ikan dilarang dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (2 Lokasi) Persentase Penanganan Kasus pelanggaran perkarantinaan Ikan,mutu keamanan hasil Perikanan yang di selesaikan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (100%). Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (28), Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai

KIPM Lampung (17).Monitoring Kesegaran ikan residu bahan berbahaya Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (1).Sertifikat Hazard Analysis Critikal control point (HACCP) lingkup UPT Balai KIPM Lampung (56) UPI yang Konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Lingkup UPT Balai KIPM Lampung(20).Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Lingkup Balai KIPM Lampung (90,92). Verifikasi penerapan system pengendalian (official Control) lingkup Balai KIPM Lampung (73) Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (98%).

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Balai KIPM Lampung atas tersusunnya

Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024

Balai KIPM Lampung



Ashari Syarief.S.Pi.M.P

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (Balai KIPM Lampung), Badan Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Badan KIPM) rencana kinerjanya akan memfokuskan dukungan pada kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Untuk mencapai Sasaran Kinerja tersebut, pada tahun 2023 Balai KIPM Lampung menetapkan 4 Sasaran Strategis (SS) dengan 26 Indikator Kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sasaran Strategis tersebut adalah 1) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan ikan secara professional dan partisipatif 2). Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif, 3). Terselenggaranya Sistem Pengendalian dan pengawasan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dan 4). Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, Balai KIPM Lampung melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik (Triwulanan).

Jumlah Sasaran Strategis yang dapat diukur sebanyak 4 buah yang merupakan indikator pada SS-1 sampai dengan SS-4. Berdasarkan pengukuran kinerja yang terdapat dalam Aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian Skor Kinerja IKU Tahun 2023 adalah 103,94 atau masuk dalam kriteria baik (hijau). Secara keseluruhan indikator kinerja yang harus diukur dan dapat tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Secara rinci, kondisi capaian kinerja Balai KIPM Lampung sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Capaian Kinerja BKIPM Lampung Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALIASI	
				2023	2023	%
Kegiatan 1. Karantina Ikan				2023	2023	%
SK 1.1	Terselenggara nya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikat ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	98%	99%	101
		2	Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	100%	100%	100
		3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai Ketentuan Perkarantinaan Ikan Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	100%	100%	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (lokasi)	9	10	111
		5	Investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalulintas lingkup UPT Balai KIPM Lampung	1	2	120
		6	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran jenis ikan yang dilarang dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Lampung(%)	90	100%	111
		7	Lokasi Sebaran Jenis Ikan dilarang dan/atau bersifat Invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung	2	2	100
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	92%	100%	109
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Unit)	25	28	112

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu						
SK2.1	Terselenggara nya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara Profesional dan Partisipatif	10	Sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	10	17	120
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	6	6	100
		12	Monitoring Kesegaran Ikan,residu bahan berbahaya	1	1	100
		13	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	7	8	114
		14	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Produk)	45	56	120
		15	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	17	20	117
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK.3.1	Terseleng garanya Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaa mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	16	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Lampung(nilai)	84%	90.92%	109
		17	Verifikasi penerapan sitem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Lampung	73	80	109
		18	Tingkat Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap ketentuan regulasi/peraturan perundangan kelautan dan perikanan Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	90%	98.2	108
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						

SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	19	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Lampung	75	80.13	106
		20	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (Indeks)	84	85.97	102
		21	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Lampung	85	60,89	71,63
		22	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	100	100	100
		23	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	75	98	120
		24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)	93.75	93.64	99,88
		25	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)	82	85.63	104
		26	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	77.5	78.26	100
		27	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	77.5	98.56	120

Adapun dari sisa anggaran, pada Tahun 2023 Balai KIPM Lampung telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 11.714.414.225,0 atau 95.92% dari PAGU yang dikelola sebesar Rp.12.212.630.000,00. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Tahun 2023 BKIPM Lampung secara umum cukup memuaskan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian.

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja



TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	649615 BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	PAGU	6,690,276,000	4,719,217,000	803,137,000	0	0	0	0	0	0	12,212,630,000
		REALISASI	6,517,153,037 (97.41%)	4,394,480,188 (93.12%)	802,781,000 (99.96%)	0	0	0	0	0	0	11,714,414,225 (95.92%)
		SISA	173,122,963	324,736,812	356,000	0	0	0	0	0	0	498,215,775
GRAND TOTAL		PAGU	6,690,276,000	4,719,217,000	803,137,000	0	0	0	0	0	0	12,212,630,000
		REALISASI	6,517,153,037 (97.41%)	4,394,480,188 (93.12%)	802,781,000 (99.96%)	0	0	0	0	0	0	11,714,414,225 (95.92%)
		SISA	173,122,963	324,736,812	356,000	0	0	0	0	0	0	498,215,775

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIPRAKATA.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. AGENDA BALAI KIPM LAMPUNG.....	6
E. DASAR PENGUKURAN KINERJA.....	7
F. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA.....	7
G. RUANG LINGKUP.....	7
H. WAKTU PENGUKURAN KINERJA.....	7
I. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA.....	8
J. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB 2.....	9
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A. RENCANA STRATEGIS BKIPM DAN BALAI KIPM LAMPUNG TAHUN 2020 - 2024.....	9
1. Visi KKP dan Badan KIPM KKP.....	9
2. Misi Balai KIPM Lampung.....	10
3. Tujuan Balai KIPM Lampung.....	10
4. Sasaran Strategis Balai KIPM Lampung.....	11
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	12
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023.....	12
D. KEGIATAN PENGAWASAN OPERASIONAL BALAI KIPM Lampung.....	15
E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU/ IK.....	17
BAB 3.....	18
AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. PENGELOLAAN KINERJA BALAI KIPM Lampung.....	18
B. CAPAIAN KINERJA.....	18
3.1. Realisasi Anggaran.....	63
3.2. Efisiensi Anggaran.....	64

C.	ANALISIS CAPAIAN KINERJA TA 2023 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	66
D.	ANALISIS PELAKSANAAN BELANJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	68
	BAB 4 PENUTUP	69
A.	KESIMPULAN	69
B.	PERMASALAHAN	69
C.	LANGKAH PERBAIKAN (REKOMENDASI)	70
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja BKIPM Lampung Tahun 2023	v
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Tahun 2020-2024	11
Tabel 2. 2 Tabel Penetapan Kinerja Balai KIPM Lampung TA 2023	14
Tabel 3. 1 Rentang Penilaian Capaian Kerja.....	21
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Balai KIPM Lampung Tahun 2023	22
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi IK1 Tahun 2023	26
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi IK2 Tahun 2023	28
Tabel 3. 5 Target dan Realisasi IK3 Tahun 2023	30
Tabel 3. 6 Target dan Realisasi IK4 Tahun 2023	31
Tabel 3. 7 Target dan Realisasi IK 5 Tahun 2023	32
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi IK 6 Tahun 2023	33
Tabel 3. 9 Target dan Realisasi IK 7 Tahun 2023	35
Tabel 3. 10 Target dan Realisasi IK 8 Tahun 2023	37
Tabel 3. 11 Target dan Realisasi IK 9 Tahun 2023	39
Tabel 3. 12 Target dan Realisasi IK 10 Tahun 2023	41
Tabel 3. 13 Target dan Realisasi IK 11 Tahun 2023	42
Tabel 3. 14 Target dan Realisasi IK 12 Tahun 2023	44
Tabel 3. 15 Target dan Realisasi IK 13 Tahun 2023	46
Tabel 3. 16 Target dan Realisasi IK 14 Tahun 2023	47
Tabel 3. 17 Target dan Realisasi IK 15 Tahun 2023	49
Tabel 3. 18 Target dan Realisasi IK 16 Tahun 2023	50
Tabel 3. 19 Target dan Realisasi IK 17 Tahun 2023	51
Tabel 3. 20 Target dan Realisasi IK 18 Tahun 2023	53
Tabel 3. 24 Target dan Realisasi IK 19 Tahun 2023	56
Tabel 3. 25 Target dan Realisasi IK 20 Tahun 2023	57
Tabel 3. 26 Target dan Realisasi IK 21 Tahun 2023	58
Tabel 3. 27 Target dan Realisasi IK22 Tahun 2023	59
Tabel 3. 28 Target dan Realisasi IK23 Tahun 2023	61
Tabel 3. 29 Target dan Realisasi IK 24 Tahun 2023	62
Tabel 3. 30 Target dan Realisasi IK 25 Tahun 2023	63

Tabel 3. 30 Target dan Realisasi IK 26 Tahun 2023	63
Tabel 3. 30 Target dan Realisasi IK 26 Tahun 2023	64
Tabel 3. 31 Data Anggaran	65
Tabel 3. 32 Realisasi Pendapatan dan Belanja Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023	
Tabel 3. 33 Perkembangan Realisasi dan Sisa Anggaran Balai KIPM Lampung per 31 Desember 2023	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai KIPM Lampung	4
Gambar 3. 1 Dashboard Capaian Kinerja Balai KIPM Lampung Tahun 2023.....	19
Gambar 3. 2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Balai KIPM Lampung...	40

BAB 1 PENDAHULUAN

- **LATAR BELAKANG**

Sebagai upaya mendukung Visi nasional kita " Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" melalui Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia yang diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan tingkat reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman keamanan dan kedaulatan Negara.

Arah Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan yang baik salah satu pilarnya adalah Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

Selaras dengan fungsinya Badan KIPM menyelenggarakan fungsi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan, sebagai aparat ASN seluruh pegawai BKIPM dituntut untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional dalam RPJM 2020-2024, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

- **DASAR HUKUM**

Balai KIPM Lampung melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48 PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan.

- **TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48 PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Lampung memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern dilingkungan Balai KIPM Lampung KKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai KIPM Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantina ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan perkarantina ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantina ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan administrasi badan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

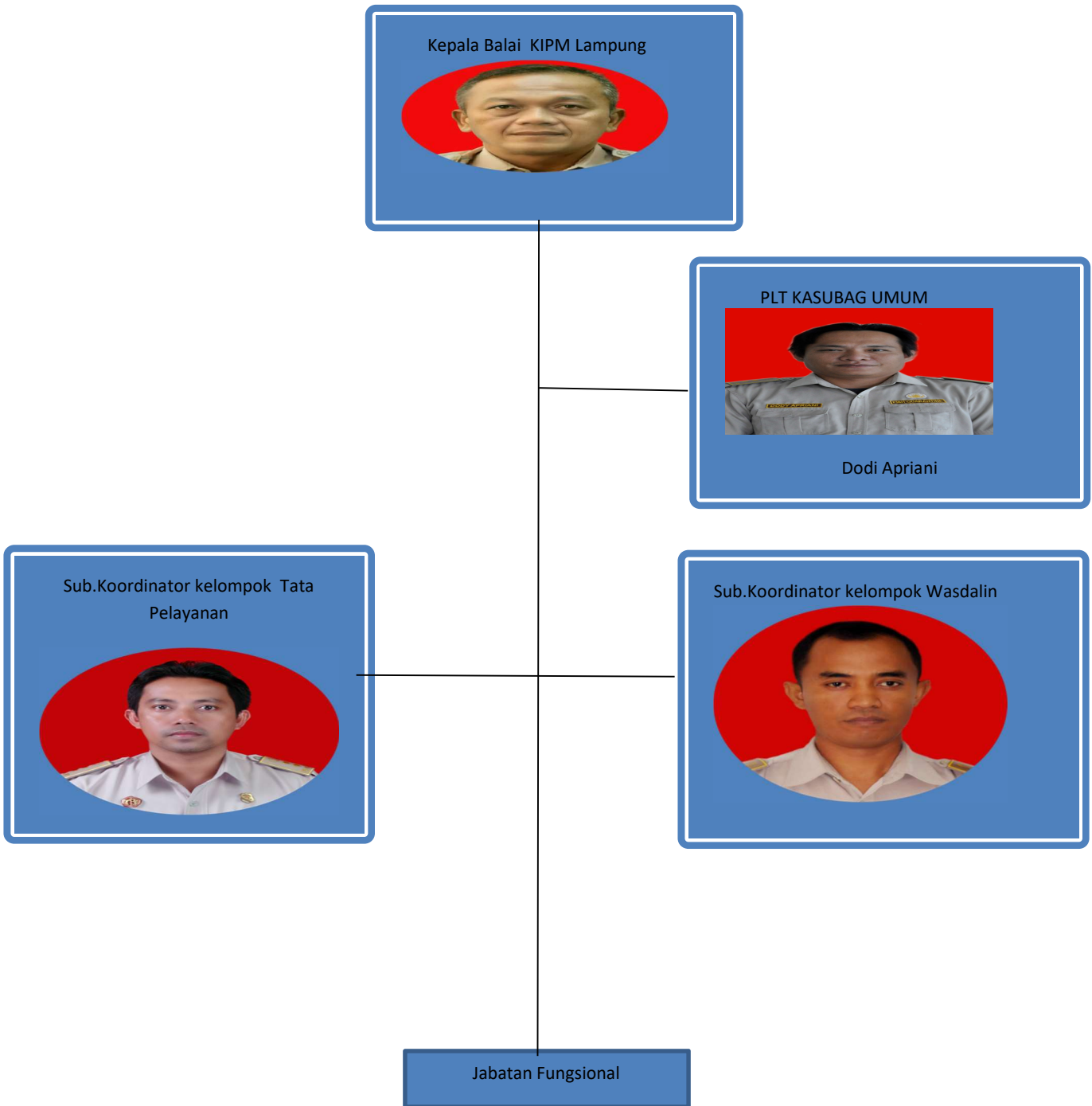
Sesuai Permen KP Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan. Struktur Organisasi Balai KIPM Lampung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Melaksanakan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- Melaksanakan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
- Melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- Melaksanakan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- Melaksanakan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu;
- Melaksanakan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- Menyusun pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- Melaksanakan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- Melaksanakan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;

- Menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- Menindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- Mengumpulkan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- Melaksanakan urusan ketatausahaan.

**STRUKTUR ORGANISASI BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG**



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai KIPM Lampung

- **AGENDA BALAI KIPM LAMPUNG**

Salah satu agenda misi pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional yaitu dengan meningkatkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dengan meningkatnya peran serta Balai KIPM Lampung diharapkan mampu mencapai misi tersebut.

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktiktata kelola pemerintahan.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini, terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai KIPM Lampung melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam agenda pembangunan nasional berupa Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

- **DASAR PENGUKURAN KINERJA**

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai KIPM Lampung Nomor : SP DIPA- 032.13.0.649615/2023 tanggal 30 November 2022.

- **TUJUAN PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

- Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Balai KIPM Lampung sampai dengan Tahun 2023 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja.
- Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan masing-masing Balai KIPM Lampung.

- **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Evaluasi kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Balai KIPM Lampung dan Perjanjian Kinerja level 2 yang disepakati Kepala Balai KIPM Lampung dengan Kepala Badan KIPM.

- **WAKTU PENGUKURAN KINERJA**

1. Periode yang dinilai : Oktober s.d. Desember 2023
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Januari 2024

- **METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

- Pengukuran atas Sasaran Kinerja Balai KIPM Lampung sampai dengan 31 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023.
- Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 17 Januari 2024.

- **SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

- 1) Pendahuluan yang mencakup latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, ruang lingkup dan metodologi pengukuran kinerja;
- 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Renstra KKP dan BKIPM, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU;
- 3) Akuntabilitas Kinerja yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Balai KIPM Lampung, Capaian Kinerja Tahun 2023, dan Realisasi Rencana Aksi Tahun 2023; dan
- 4) Penutup yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BKIPM DAN BALAI KIPM LAMPUNG TAHUN 2020 - 2024

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Penyusunan Rancangan Renstra KKP 2020-2024 menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Rancangan Renstra 2020-2024 dan turunannya pada Balai KIPM Lampung sebagai bagian dari unit Eselon I di bawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP dan Badan KIPM KKP

Rancangan Visi KKP, adalah keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun yang merupakan perwujudan Visi Presiden yang gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut agar dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Balai KIPM Lampung merancang visinya sesuai misi BKIPM sebagai berikut :

“Hasil Perikanan yang sehat, bermutu aman dan terpercaya untuk terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumberdaya kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.”

Visi tersebut *dilatarbelakangi* oleh adanya keinginan seluruh pegawai Badan KIPM KKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP. Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

2. Misi Balai KIPM Lampung

Misi Balai KIPM Lampung dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Badan KIPM, yaitu: Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Balai

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen hayati yang dilindungi dilarang, dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju dan mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas hama dan penyakit.

KIPM Lampung dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

3. Tujuan Balai KIPM Lampung

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Balai KIPM Lampung Adapun tujuan strategis Balai

KIPM Lampung :

- a. *Terwujudnya Kinerja Balai KIPM Lampung yang Efektif dan Efisien;*
- b. *Terciptanya Suatu Sistem dan Tata Kelola Balai KIPM Lampung yang Baik;*
- c. *Terwujudnya Budaya Integritas di Lingkungan Balai KIPM Lampung*

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektifitas peran pengawasan operasional Balai KIPM Lampung. Keberhasilan capaian tujuan tersebut di indikasikan dengan capaian Sasaran Strategis.

Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Balai KIPM Lampung yang disampaikan di atas tertuang dalam rancangan Renstra Balai KIPM Lampung 2020-2024 yang telah ditetapkan seiring dengan penetapan Renstra BKIPM.

4. Sasaran Strategis Balai KIPM Lampung

Secara keseluruhan, melaksanakan Sasaran Strategis menjadi 4 (empat) SS seperti disajikan pada tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS	
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan ikan secara professional dan partisipatif
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
3	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
4	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Balai KIPM Lampung Tahun 2020-2024

Sebagai bagian dari unit kerja di lingkup BKIPM, Balai KIPM Lampung harus mendukung sasaran strategis pada tingkat Badan KIPM. Sasaran Strategis (SS) lingkup Balai KIPM Lampung merupakan mendukung capaian kinerja level Badan KIPM, (level 1). Selanjutnya, hal tersebut di-*cascading* ke level di bawahnya dan di-*alignment* antar staff ke seluruh pegawai Balai KIPM Lampung.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup KKP pada tahun 2023, Balai KIPM Lampung melaksanakan 4 (empat) kegiatan utama dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp. 12.212.630.000. Kedua kegiatan tersebut adalah :

1. Pengendalian mutu anggaran senilai Rp. 1.738.637.000
2. Karantina Ikan dengan alokasi anggaran Rp, 645.601.000
3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Alokasi anggaran Rp.858.500.000
4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai KIPM Lampung dengan alokasi anggaran senilai Rp 8.969.892.000

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023

Penetapan kinerja Balai KIPM Lampung TA 2023 dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Balai KIPM Lampung dengan Kepala Badan KIPM tersaji dalam Lampiran 1.sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1. 1	Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan</i>	1	Efektivitas Sertifikat ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	98

	<i>sistem perkarantinaan ikan secara professional dan partisipatif</i>	2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona UPT Balai KIPM Lampung (%)	100
		3	Persentase Tindakan Karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (lokasi)	9
		5	Investigasi HPIK/HPI tertentu pada Kegiatan Lalulintas lingkup UPT Balai KIPM Lampung	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (lokasi)	2
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	92
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Unit)	25
		Kegiatan 2. Pengendalian Mutu		
SK2. 1	<i>Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif</i>	10	Sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	10
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)	6
		12	Monitoring Kesegaran Ikan, Residu bahan berbahaya lingkup UPT Balai KIPM Lampung	1
		13	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan ang menerapkan sistem Traceability Lingup UPT Balai KIPM Lampung	7
		14	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Produk)	45
		15	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	17

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3. 1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan <i>sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan</i> secara professional dan partisipatif	16	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Lampung(nilai)	84
		17	Verifikasi Penerapan sistem pengendalian (Official Control) lingkup otoritas komptteten lingkup UPT Balai KIPM Lampung	73
		18	Tingkat Kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	90
Kegiatan 4 Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK.4.1	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM	19	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Lampung	75
		20	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Lampung	84
		21	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	85
		22	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Balai KIPM Lampung	≤ 0.5
		23	Presentasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	75
		24	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai IPM Lampung	89
		25	Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Lampung	86
		26	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Lampung	77.5
		27	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	77.5

Tabel 2. 2 Tabel Penetapan Kinerja Balai KIPM Lampung TA 2023

D. KEGIATAN PENGAWASAN OPERASIONAL BALAI KIPM LAMPUNG

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja sebagai UPT Badan KIPM lingkup KKP, Balai KIPM Lampung melaksanakan program dan kegiatan Pengendalian mutu, karantina ikan, Sistem dan Standar Kepatuhan, dan Dukungan Manajemen” dengan rincian kegiatan;

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam beberapa komponen kegiatan, antara lain :

1. Pelaksanan pemantauan HPIK
2. Operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
3. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
5. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
6. Pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
7. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
8. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
9. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu;
10. Pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;

11. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
12. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium
13. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
14. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Tera-Langgarnya Penyelenggaraan dan Penguasaan Sistem Perencanaan Sistem Profesional dan Paralelitas	Salah satunya merupakan kompetensi layanan publik di UPT Balai KIPM Lampung (84)	Bulan Mulai Karantina	Bulan Mulai Karantina	830.000.000	Nilai	84			84			84			84		84	
	UPT Balai yang menerbitkan izin perijinan Official (Online) Lingkup Operasi Kompetensi Balai UPT Balai KIPM Lampung	UPT Balai yang menerbitkan izin perijinan Official (Online) Lingkup Operasi Kompetensi Balai UPT Balai KIPM Lampung	UPT Balai yang menerbitkan izin perijinan Official (Online) Lingkup Operasi Kompetensi Balai UPT Balai KIPM Lampung	47.920.000		73			73			73			73			73
Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melakukan izin dari hasil perubahan terhadap regulasi/peraturan (%)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melakukan izin dari hasil perubahan terhadap regulasi/peraturan (%)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melakukan izin dari hasil perubahan terhadap regulasi/peraturan (%)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melakukan izin dari hasil perubahan terhadap regulasi/peraturan (%)	10.000.000	Person	90			90			90			90			90
	Verifikasi kepatuhan pelaksanaan operasional pengalihan izin	Verifikasi kepatuhan pelaksanaan operasional pengalihan izin	Verifikasi kepatuhan pelaksanaan operasional pengalihan izin	3.000.000														
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Profesional ASN Lingkup Balai KIPM Lampung	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	8.327.033.000	Indeks	84												84
	Nilai Rekomendasi Kinerja Kinerja Balai KIPM Lampung	Layanan Perkantoran	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	30.716.000	Nilai	85												85
	Batas Ferragge Relat Persentase UPT Balai KIPM Lampung	Layanan Perkantoran	Layanan Manajemen SDM	34.600.000	Nilai	<0,5												<0,5
	Rekomendasi hasil pengujian yang dihasilkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Lampung (%)	Layanan Perkantoran	Layanan Penyelenggaraan Kelembagaan	11.428.000	Nilai	75				75								75
	Nilai IKPA UPT Balai KIPM Lampung	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	53.108.000	Nilai	89												89
	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung	Layanan Perkantoran	Layanan Manajemen Keuangan	12.916.000	Nilai	86												86
	Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Berbasis (Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung) (%)	Pengadaan Alat Laboratorium	Pengadaan Alat Laboratorium	777.000.000	Person	77,5												77,5
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan dan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	Layanan Internal	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	111.730.000	Person	77,5												77,5

Balai KIPM Lampung, 23 Februari 2024

 Kepala Balai KIPM Lampung
 S.P., M.A.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA BALAI KIPM LAMPUNG

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi didalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, Balai KIPM Lampung membentuk tim pengelola kinerja dari perwakilan masing-masing bagian di Balai KIPM Lampung untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap Tri wulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis *website* di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

No	Kode Warna	Rentang Nilai	Arti
1.	Hijau	≥ 100	Baik
2.	Kuning	70 s.d < 100	Cukup
3.	Merah	< 70	Kurang
4.	Abu Abu	Belum Ada Capaian	
5.	Putih	Belum Input Capaian	

Tabel 3. 1 Rentang Penilaian Capaian Kerja

Sesuai dengan pendekatan BSC, Sasaran Kinerja Balai KIPM Lampung tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) SS yang diukur keberhasilannya melalui capaian 27 IKU/IK dengan target yang ditentukan.

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Balai KIPM Lampung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Capaian kinerja yang diukur per Triwulan pada Tahun 2023

untuk Level 1 (Badan KIPM) terdiri dari capaian kinerja pada 4 (empat) dari 4 (empat) Sasaran Strategis (SS) dengan dari 27 IKU/IK. Target SS dan IKU Balai KIPM Lampung yang diukur Pertriwulan pada Tahun 2023 menggambarkan target yang harus dicapai kinerjanya tahun 2023. Target SS dan IKU Balai KIPM Lampung Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Peranan Seccara Profesional dan Partisipatif	1	Efetivitas Sertifikasi Ekspor ikan dari hasil perikanan yang memenuhi Persyaratan Karantina lingkup UPT Balai KIPM Lampung	98%	99%	101
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Lampung	100%	100%	100
		3	Presentasi Tindakan karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	100%	100%	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung	9	10	111
		5	Investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalulintas lingkup UPT Balai KIPM Lampung	1	2	120
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Lampung	90%	100%	112

		7	Lokasi sebaran Jenis Ikan dilarang,dan/atau bersifat invansif yyang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung	2	2	100
		8	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan,mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaian lingkup UPT Balai KIPM Lampung	92%	100%	109
		9	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Lampung	25	28	120
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan Partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	10	17	120
		11	Pengawasan Mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Lampung	6	6	100
		12	Monitoring Kesegaran Ikan,residu bahan berbahaya lingkup UPT Balai KIPM Lampung	1	1	100
		13	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkkkan sistem Tracebility lingkup UPT Balai IPM Lampung	7	8	114
		14	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) lingkup UPT Balai KIPM Lampung	45	56	120
		15	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	17	20	117

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		%
3	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, mutu dan Keamanan Hasil Peranan Secara Profesional dan Partisipatif	16	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Balai KIPM Lampung	84%	90.92%	109
		17	Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas kompeten lingkup UPT Balai KIPM Lampung	73	80	109
		18	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi peraturan lingkup UPT Balai KIPM Lampung	90%	98%	108
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		%
4	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	19	Nilai Minima yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Lampung	75	80,13	106
		20	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Lampung	84	85,97	102
		21	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker lingkup UPT Balai KIPM Lampung.	85	60,89	71,63
		22	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	100	100	100
		23	Presentasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Lampung	75	98	120

		24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	93.75	93.64	99,88
		25	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	82	85,63	104
		26	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT Balai KIPM Lampung	77,5	78,6	100
		27	Tingkat Kepatuhan BMN BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Lampung	77,5	98,56	120

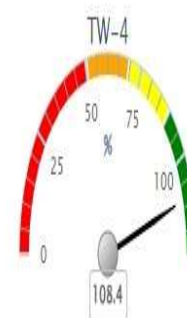
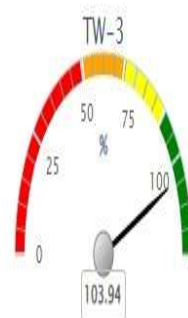
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Balai KIPM Lampung Tahun 2023

Unit Kerja

1024000000 - BALAI KIPM LAMPUNG

Tahun

2023



Capaian Kinerja IKU + IKM

TW1	TW2	s/d TW2	TW3	s/d TW3	TW4	s/d TW4
👍 108,41 Q	👍 105,50 Q	👍 105,54	👍 103,94 Q	👍 104,96	👍 108,40 Q	👍 109,39

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50

Gambar 3. 2 Dashboard Capaian Kinerja Balai KIPM Lampung Tahun 2023

Pada gambar diatas, Nilai capaian kinerja IKU mencapai nilai 109,39. Sedangkan capaian kinerja IKU dan IK secara keseluruhan ditunjukkan melalui skor kinerja sebesar 109,39 yang masuk dalam kriteria baik (hijau).

Hasil dari capaian kinerja Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU/ IK, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada 26(dua puluh lima) IKU yang diukur pada Triwulan IV Tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Perlu disampaikan bahwa capaian kinerja SS dihasilkan dari kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Indikator Kinerja (IK) yang mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan SS tersebut. Capaian kinerja masing-masing Indikator dari masing-masing SS dan IKU/IK dapat disampaikan sebagaimana berikut.

Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif.

Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi Persyaratan Karantina menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Lampung. Nilai sasaran strategis ini pada Triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 99 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai KIPM Lampung, yang dimaksud yaitu ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan negara tujuan dan tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor.

IK 01

Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi Persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Lampung

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan diamanatkan bahwa setiap media pembawa dan/atau hasil perikanan yang dikeluarkan dari wilayah NKRI ke luar negeri wajib melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk keperluan tindakan karantina dan/atau pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, memenuhi persyaratan dari negara tujuan, dilengkapi SKIPP untuk hasil perikanan yang ditujukan untuk konsumsi dan/atau SPM untuk hasil perikanan yang ditujukan untuk non konsumsi, dan dilengkapi dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta guna mengimplementasikan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 92 /PERMEN - KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, maka Balai KIPM Lampung telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin bahwa setiap ikan dan hasil perikanan yang diekspor melalui Balai KIPM Lampung telah memenuhi persyaratan ekspor sebagaimana yang diminta oleh negara tujuan sehingga tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor.

Indikator kinerja Persentase Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Persyaratan Mutu dan Kesehatan Ikan di Lingkup Balai KIPM Lampung dihitung menggunakan formula, sebagai berikut :

$$\% \frac{\sum \text{Ekspor} - \sum \text{Penolakan Oleh Negara}}{\text{Tujuan}}$$

Sementara data yang digunakan untuk menghitung indikator kinerja ini berasal dari Report Operasional Bulanan Karantina Ikan dan Mutu serta Report Pelanggaran Karantina Ikan yang diambil dari aplikasi *Sisterkaroline*.

Kontribusi Balai KIPM Lampung dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertifikat Kesehatan Ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Product/KID1*) yang diterbitkan oleh Balai KIPM Lampung di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor yang disebabkan oleh kesalahan dokumen dan mutu hasil perikanan berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tujuan

Perkembangan capaian indikator kinerja ini dari tahun 2018 s.d. 2022 serta perbandingan antara target dan capaian dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.3 dibawah ini.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS1. Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina</i> secara professional dan partisipatif												
IK 1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor ikan dari hasil perikanan yang memenuhi Persyaratan Karantina lingkup UPT Balai KIPM Lampung	-	100	100	100	100	98	99	101	100	98	100

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi IK1 Pada Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 99%.

Pencapaian Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara tujuan ekspor di UPT Balai KIPM Lampung pada Tahun 2023 sebesar 99% melebihi dari Target 98%. Dengan capaian tersebut didapat dari jumlah frekuensi ekspor tidak terjadi Penolakan Tahun 2023 jumlah HC Ekspor yang diterbitkan sama dengan Jumlah dengan HC Ekspor yang tidak ditolak selama tahun 2023. Capaian Tahun 2023 sama dengan realisasi capaian Tahun 2022.

Kegiatan Pendukung dalam Pencapaian indikator ini antara lain :

- Melakukan Kegiatan Registrasi UPI ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor.

IK 2

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup UPT Balai KIPM Lampung(%)

Untuk kegiatan Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) lingkup UPT Balai KIPM Lampung yang dibebankan pada Balai KIPM Lampung pada Tahun 2023 untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut sejak awal tahun 2023, selain karena upaya Balai KIPM untuk tetap memberikan perlindungan terhadap plasma nutfah di propinsi bali juga data penyakit bagi daerah serta sebagai bahan informasi HPIK dalam keputusan Menteri yang selalu diperbahui. Data perbandingan antara target Tahun 2023 dan Target serta Realisasinya Pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Indikator Kinerja		Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
		2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%
SS1. Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan</i> secara professional dan partisipatif												
IK 2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 3. 8 Target dan Realisasi IK 2 Pada Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 tercapai 100%.

Pencapaian indicator ini pada tahun 2023 dapat dinyatakan sebesar 100%.Hal ini menunjukkan bahwa setiap komoditas perikanan yang dilalulintaskan telah melakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan

daerah yang dituju. Capaian Tahun 2023 sama dengan realisasi capaian Tahun 2022.

Kegiatan Pendukung dalam Pencapaian indikator ini antara lain :

- Melakukan Kegiatan Pengawasan dan Pengawalan Impor

IK 03

Presentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan Perkarantinaan ikan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)

Dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, maka importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI. Penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan.

Indikator kinerja Persentase Ikan dan Hasil Perikanan Impor Memenuhi Persyaratan Mutu dan Bebas Penyakit Lingkup Balai KIPM Lampung diukur menggunakan formula, sebagai berikut :

$$\% \text{ importasi} = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

$\frac{\text{Jumlah Importasi yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah Total Importasi}} \times 100\%$

Keterangan

A : Prosentase penanganan impor yang masuk ke wilayah RI memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan, yang dihitung melalui rumus.

Agar dapat meningkatkan keberhasilan tindakan pencegahan dan penjaminan terhadap impor ikan dan hasil perikanan sehingga terjamin mutu dan bebas PIK, maka diperlukan upaya-upaya antarlain:

1. Dukungan sarana prasarana serta peningkatan kemampuan SDM

laboratorium sehingga mampu melakukan pengujian terhadap seluruh target pemeriksaan penyakit ikan Eksotik ataupun HPIK sesuai kebutuhan lalulintas MP di Balai KIPM Lampung,

2. Peningkatan kompetensi pegawai Balai KIPM Lampung dalam melakukan analisis terhadap lalulintas MP sehingga mampu menentukan target PIK secara benar berdasarkan Keputusan
3. Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Jenis-jenis PIK, Golongan dan MP atau Persyaratan Negara Tujuan. Perkembangan capaian indikator kinerja sampai bulan September 2023.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%
SS1. Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaa</i> secara professional dan partisipatif											
IK3	Presentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan Perkarantinaa n ikan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)										
	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.4 Target dan Realisasi IK3 Pada Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Pencapaian Impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit ikan di UPT Balai KIPM Lampung Tahun 2023 sebesar 100% sesuai Target 100% dengan capaian tersebut didapat dari jumlah frekuensi Impor tidak terjadi Penolakan. Pada Tahun 2023 jumlah Impor yang diterima sama Jumlah dengan Jumlah Impor yang tidak ditolak selama Tahun 2023 yang tidak ada adanya jenis PIK hasil Pemeriksaan dari produk yang diimpor. Capaian Tahun 2023 sama dengan realisasi capaian Tahun 2022. Kegiatan Pendukung dalam Pencapaian indikator ini antara lain :

- Melakukan Kegiatan Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan hasil Perikanan.

Untuk kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina yang dibebankan pada Balai KIPM Lampung pada Tahun 2023 untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut sejak awal tahun, selain karena upaya Balai KIPM untuk tetap memberikan data penyakit bagi daerah serta sebagai bahan informasi HPIK dalam keputusan Menteri yang selalu diperbahui. Sampai dengan akhir masih dalam proses pengambilan sampel.

Indikator Kinerja		Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
		2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%
SS1. Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan</i> secara professional dan partisipatif												
IK 4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung	-	9	10	10	10	9	10	111	100	9	111

Tabel 3.5 Target dan Realisasi IK4 Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%.

Pencapaian Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina yang teridentifikasi di UPT Balai KIPM Lampung Tahun 2023 10 Lokasi (Kab.Pringsewu. Kab. Tanggamus. Kab.Lampung Barat. Kab. Pesisir Barat. Kab. Lampung Selatan. Kab.Pesawaran. Kab.Lampung Timur. Kab.Lampung Tengah. Kab.Tulang Bawang.Kab. Tanggamus) dengan Target 9 Lokasi dengan capaian tersebut didapat dari jumlah Capaian Tahun 2023 sama dengan realisasi capaian Tahun 2022. Kegiatan Pendukung dalam Pencapaian indikator ini antara lain :

- Melakukan Kegiatan Perjalanan Pemantauan Tahun 2023

Untuk kegiatan Investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalulintas media pembawa adalah upaya sistematis terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko pada kegiatan importasi dan lalulintas media pembawa HPI/HPIK. Investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalulintas adalah kegiatan penelusuran pada kejadian Outbreak/ wabah penyakit dan hasil positif penyakit ikan pada kegiatan pemantauan penyakit HPIK, monitoring dan Survailan penyakit ikan dan lalulintas media Pembawa.

Indikator Kinerja		Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
		2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%
SS1. Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan</i> secara professional dan partisipatif												
IK 5	Investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalulintas Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	2	120	120	1	100

Tabel 3.5 Target dan Realisasi IK5 Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2022 belum ada IKU tersebut dan merupakan IKU baru di tahun 2023 dan ada capaian 2.

IK 6

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Lampung(%)

Untuk kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina yang dibebankan pada Balai KIPM Lampung pada Tahun 2023 untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut sejak awal tahun 2019, sesuai Tabel. 3.6 selain karena upaya Balai KIPM Lampung untuk tetap memberikan data penyakit bagi daerah serta sebagai bahan informasi HPIK dalam keputusan Menteri yang selalu diperbarui.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS1. Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan</i> secara professional dan partisipatif												
IK 6	Persentase pengawasan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung	-	100	100	100	100	90	100	111	100	100	100

Tabel 3. 6 Target dan Realisasi IK6 Pada Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%.

Pencapaian Persentase pengawasan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung di UPT Balai KIPM Lampung Pada Tahun 2023 100% dengan Target 90%.

Kegiatan Pendukung dalam Pencapaian indikator ini antara lain :

- Melakukan Kegiatan Identifikasi pemasukan dan Pengeluaran Jenis Ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi

- Melakukan Kegiatan Pengawasan dan atau pengendalian PIK, Agensia Hayati, Jenis ikan yang dilindungi dan atau dibatasi dalam wilayah Rebulik Indonesia

IK 7 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (lokasi)

Untuk kegiatan pemantauan Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (lokasi) yang dibebankan pada Balai KIPM Lampung pada Tahun 2023 untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tahun 2019, selain karena upaya Balai KIPM Lampung untuk tetap memberikan perlindungan terhadap plasma nutfah di propinsi Lampung juga data penyakit bagi daerah serta sebagai bahan informasi HPIK dalam keputusan Menteri yang selalu diperbarui.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS1. Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina</i> secara professional dan partisipatif												
IK 7	Sebaran Jenis ikan yang dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi	-	2	2	2	2	2	100	100	2	100	

Tabel 3. 7 Target dan Realisasi IK 7 Pada Tahun 2023 Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%.

Pencapaian Sebaran Jenis ikan yang dilarang dan/ ataubersifat invasif yang diidentifikasi pada Tahun 2023 dengan 2 Lokasi (Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah) dari Target 2 Lokasi Tahun 2023 .

IK 8**Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)**

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. Indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan

- a Diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana Undang-Undang No. 16/1992;
- b Serahkara (dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Perkara), jika kasus memenuhi unsur pidana diluar Undang-Undang No.16/1992;
- c Tindakan karantina Pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana Undang-Undang No. 16/1992;
- d Pelepasliaran atau diserahkan keBKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Mengacu pada Laporan Rekapitulasi Perkembangan Kasus Tindak Pidana Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Lingkup Balai KIPM Lampung. Dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Keterangan :

$$\% \text{ Kasus} = \frac{A + B}{N}$$

- A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang Diselesaikan
- B : Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu yang diselesaikan
- C : Total kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu

Maka diperoleh persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 100% Data perbandingan antara target Tahun 2023 dan Target serta Realisasinya Pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.9

Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2023										Renstra 2020-2024	
		2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2023 (%)	Target	%	
SS1. Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan</i> secara professional dan partisipatif													
IK 8	Persentase Penanganan Kasus pelanggaran perkarantinaan , keamanan hayati ikandan sistem mutu yang diselesaikan	-	100	100	100	100	92	100	109	100	92	100	

Tabel 3. 9 Target dan Realisasi IK 8 pada Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%.

Pencapaian indicator ini pada tahun 2023 dapat dinyatakan sebesar 100%.Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan sehingga capaiannya 100% . Capaian Tahun 2023 sama dengan realisasi capaian Tahun 2022.

Kegiatan Pendukung dalam Pencapaian indikator ini antara lain :

- Melakukan Kegiatan Intelijen dan Kepolisian Khusus dalam Rangka Tindakan Karantina Ikan di Pintu Pemasukan dan Pengeluaran
- Koordinasi Penanganan Kasus Penahanan/ Penolakan Produk Perikanan.

Unit Usaha Perikanan merupakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) yang menerapkan prinsip Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) yaitu : IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI), IKI telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity serta IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).

IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB. Pendirian IKI di sentra perikanan dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan. Menghitung sertifikasi unit usaha perikanan yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik sebagai berikut :

Unit Usaha Perikanan yang Menerapkan CKIB	=	Jumlah SCKIB yang Telah Diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan
-------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------

Jumlah sertifikat IKI/CKIB unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Lampung. Ikan (IKI) yang menerapkan prinsip Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB):

1. IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI);
2. IKI telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity;
3. IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).

IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB. Menghitung sertifikasi unit usaha perikanan yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik: Unit Usaha Perikanan yang menerapkan CKIB = Jumlah SCKIB yang

telah diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan.

Indikator Persentase Jumlah sertifikat IKI/CKIB unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Lampung. Data perbandingan antara target Tahun 2023 dan Realisasinya Pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.10

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS1. Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina</i> secara professional dan partisipatif												
IK 9	Sertifikasi instalasi karantina ikan pada Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi standard dan menerapkan biosecurity pada lingkup UPT Balai KIPM Lampung	-	-	12	18	24	25	28	112	34	25	100

Tabel 3. 10 Target dan Realisasi IK 9 pada Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami Kenaikan 112%.

Pencapaian indicator ini pada tahun 2023 dapat dinyatakan sebesar 112%. Hal ini pada tahun 2023 target jumlah verifikasi pada Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi standard dan menerapkan Biosecurity sebanyak 28 Unit.

Sasaran Strategis Terselenggaranya *pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan* secara professional dan partisipatif menjaditolok

ukur dari Pusat Pengendalian Mutu (PM) dan Balai KIPM Lampung. Nilai ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja :

1. Sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)
2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)
3. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan
4. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Produk)
5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)

IK 10

Jumlah Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Lingkup Balai KIPM Lampung

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan

prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier. Indikator Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) lingkup UPT Balai KIPM Lampung. Data perbandingan antara target Tahun 2023 serta Realisasinya dibandingkan dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaa secara professional dan partisipatif												
IK 10	Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Lingkup Balai KIPM Lampung	-	9	0	5	6	10	17	120	120	6	100

Tabel 3. 11 Target dan Realisasi IK 10 pada Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan 120%.

Pencapaian indikator ini pada tahun 2023 dapat dinyatakan sebesar 120%. Balai KIPM Lampung Menargetkan 5 unit yang dapat sertifikat CPIB dengan realisasi 17 Unit Yaitu UD.SEHATI, BUDI, MP.LESTARI WANDI, ATOK SUSANTO, TENDRI SAU JAYA FADILLAH, ANDRI AGUS MP.COMARA, CV.MINIPLANT MANDIRI. TRI SUKADI, MINIPLANT KUN FAYAKUN, M.SYUKUR(1), M.SYUKUR, DARYONO, YAYU FLOR. HAFLIN, MINIPLANT ANAK NELAYAN HJ.NUR HAYATI, MASTER II, UD ANUGRAH AGUS SUJONO, UD.AKUR SUWANTO, UD.DOA MAMA. HENDRO, PANI SAPUTRA. SYAMSUDDIN Sehingga capaiannya Tahun 2023 masih 120% dari capaian Tahun 2022.

Pengawasan mutu hasil perikanan domestik di lingkup Balai KIPM Lampung merupakan implementasi dari INPRES No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan INPRES No. 01 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari :

- a. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/*Good Handling Practices* (GHdP);
- b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus;
- c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu :
 - Pengujian kesegaran ikan (*organoleptik*);
 - Pengujian mikrobiologi (*Total Plate Count, E. colli, Salmonella*, dan parameter lain apabila dibutuhkan);

Indikator Persentase Jumlah monitoring hasil perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Lampung. Data perbandingan antara target Tahun 2023 serta Realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023						Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%		
SS2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan secara professional dan partisipatif													
IK 11	Pengawasan Mutu hasil Perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Lampung	-	1	2	7	6	6	6	100	100	6	100	

Tabel 3. 12 Target dan Realisasi IK 11 pada Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 masih 100%.

Pencapaian indikator ini pada tahun 2023 dapat dinyatakan sebesar 100%. Balai KIPM Lampung Menargetkan 6 Lokasi terdiri dari :

1. Kota Bandar Lampung (Psr Modern Chandra,Psr Modern Galael, TPI/PPI Gudang Lelang,Psr Tradisional Panjang, Psr Tradisional Way Halim,Psr Tradisional Pasir Gintung,Psr Tradisional Tugu,Pasar Modern Superindo,TPI/PPI Lempasing,Psr Tradisional Sukarame)
 2. Kota Metro (Psr Tradisional Metro,Psr Modern Chandra Metro)
 3. Kab. Lampung Selatan (Psr Tradisional Natar,Psr Modern Chandra,TPI/PPI Rangai,Psr Tradisional Kalianda,TPI/PPI Muara Piluk,TPI/PPI Dermaga BOM)
 4. Kab. Tanggamus (TPI/PPI Kota Agung, Psr Tradisional Gisting)
 5. Kab.Lampung Timur (Psr Tradisional Way Jepara,TPI/PPI Labuhan Maringgai, TPI/PPI Kuala Penet)
 6. Kab.Pringsewu (Psr Tradisional Pringsewu,Psr Modern Pringsewu)
- Sehingga capaiannya Tahun 2023 hanya 100% dari capaian Tahun 2022

Sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat konsumen global, tuntutan konsumen terhadap ketersediaan bahan pangan termasuk produk hasil perikanan yang bermutu dan memenuhi jaminan keamanan pangan (Quality Assurance) semakin meningkat. Kondisi tersebut berdampak kepada negara maju yang cenderung memperketat persyaratan dan ketentuan impor terutama yang berkaitan dengan persyaratan mutu produk hasil perikanan. Permasalahan yang menjadi sorotan terhadap hasil perikanan Indonesia adalah mutu kesegaran ikan yang ada di pelabuhan perikanan/pendaratan ikan dan suplier sangat rendah dan ditangani dengan sistem rantai dingin yang kurang maksimal serta adanya kandungan residu kimia dan bahan berbahaya sehingga ada penolakan hasil perikanan oleh negara mitra atau negara tujuan ekspor, sementara untuk di pasar domestik, masyarakat juga belum memperhatikan akan pentingnya mutu ikan. Data perbandingan antara target Tahun 2023 serta Realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.13

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan/turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%
SS2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif											
IK 12 Monitoring Kesegaran Ikan, Residu bahan berbahaya lingkup UPT Balai KIPM Lampung	-	1	-	-	1	1	1	100	100	1	100

Tabel 3. 13 Target dan Realisasi IK 12 pada Tahun 2023

Pencapaian indikator ini pada tahun 2023 dapat dinyatakan sebesar 100%. Balai KIPM Lampung Menargetkan 1 Lokasi di Perairan teluk Lampung dan Pesisir Lampung Selatan. Sehingga capaiannya Tahun 2023 100% dari capaian Tahun 2022.

Sistem *traceability* merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem *traceability* ditunjukkan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri.

Pengembangan produk perikanan berbasis system ketelusuran (*traceability*) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku.

Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara :

- a. Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam dan luarnegeri;
- b. Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- c. Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan;
- d. Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi

dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran. Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui verifikasi penerapan system ketertelusuran hasil perikanan.

Target serta Realisasinya Pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.14

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%
SS2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif											
IK 13 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem Traceability lingkup UPT Balai KIPM Lampung	-	4	1	4	5	7	8	114	120	5	100

Tabel 3.14 Target dan Realisas IK 13 pada Tahun 2023

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Data perbandingan antara target Tahun 2022 serta Realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan secara professional dan partisipatif												
IK 14	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) lingkup UPT Balai KIPM Lampung	-	40	25	40	45	45	56	120	100	45	100

Tabel 3. 15 Target dan Realisasi IK 14 pada Tahun 2023

Indikator Sertifikat penerapan system jaminan mutu (sertifikat HACCP) di unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Tahun 2023 di indicator ditargetkan 45 Sertifikat dan teralisasi 56 Serifikat. Sehingga capaiannya Tahun 2023 110%.tetapi capaian tersebut masih 100% dari capaian tahun 2022.

IK 15 UPI yang konsisten Menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Lingkup UPT Balai KIPM Lampung

Indikator jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM). Terhadap UPI yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada PERMEN KP Nomor 19/2010. Indikator jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan telah mempunyai nomor registrasi dari otoritas kompeten BKIPM. Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP.

Realisasi indikator ini sampai dengan Tahun 2023 mencapai 20 unit pengolahan ikan (UPI) dari target 17 unit atau sebesar 117% dari target Tahun 2022. Data perbandingan antara target Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.16

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024				
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%		
SS2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif													
IK15	UPI yang Konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Balai KIPM Lampung		-	-	-	15	15	17	20	117	107	15	100

Target dan Realisasi IK 15 pada Tahun 2023

Indikator unit usaha perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP dan unit usaha pembudidayaan ikan yang bersertifikat CKIB. Indikator ini pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 16 Unit dan telah terealisasi 20 Unit. Capaian Tahun 2023 Masih 107% dari capaian Tahun 2022.

IK 16 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Lampung (nilai)

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Lampung (nilai) merupakan indikator utama Balai KIPM Lampung dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survey yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Balai KIPM Lampung.

Indikator Kinerja		Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
		2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%
SS3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan secara professional dan partisipatif												
IK16	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Lampung	-	-	-	-	84	84	90,39	109	109	84	100

Tabel 3. 17 Target dan Realisasi IK 16 pada Tahun 2023



Gambar 3. 2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Periode Tahun 2023 Balai KIPM Lampung

Indikator ini tahun 2023 dengan nilai target sebesar 84 dengan teralisasi sebesar 90.39%.

Kegiatan Pendukung dalam Pencapaian indikator ini antara lain :

- Melakukan Kegiatan Penerapan Pelayanan Publik
- Sosialisasi Standar Pelayanan Publik Balai KIPM Lampung.

Untuk menghasilkan Komoditi hasil perikanan yang sehat dan bermutu diperlukan bahan baku yang baik. Hal ini dikarenakan konsumen semakin sadar perlunya komodi perikanan yang baik, sehat dan aman dikonsumsi. Untuk mencapai tujuan dimaksud maka nelayan dan pengusaha ikan di tuntut untuk menghasilkan produk yang aman bagi manusia. Dan tidak dibenarkan untuk melalulintaskan ikan dengan kualitas yang jelek karena selain ikan akan merusak citra Negara dan sekaligus akan menjadi hambatan untuk masa mendatang. Untuk mengendalikan pruduk tersebut dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel secara berkala. (official control). Tabel 3. 18 Target dan Realisasi IK 17 pada Tahun 2023.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%
SS3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif											
IK 17	-	-	-	-	85	73	80	109	29	85	100

Tabel 3. 18 Target dan Realisasi IK 17 pada Tahun 2023

Indikator ini target tahun 2023 dengan nilai sebesar 73 dan teralisasi sebesar 80.

IK 18

Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)

Untuk menghasilkan Kualitas pelayanan yang baik diperlukan sinergitas berbagai pihak yang terkait. Begitu juga layanan Balai KIPM Lampung dalam memeberikan layanan kepada stake holder diperlukan sinergitas berbagai pihak yang terkait baik di bandara ataupun di pelabuhan laut. Terutama kerjasama antara pelaku usaha dengan pihak Balai KIPM. Pihak Pelaku usaha hendaknya memahami semua regulasi yang diberlakukan untuk lalulintas produk perikanan. Agar tidak ada mis antara petugas dilapangan dengan pihak stake holder.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS3. Terselenggaranya <i>pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan</i> secara professional dan partisipatif												
IK 18	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi /peraturan (%)	-	-	-	-	90	98	98	100	100	90	100

Tabel 3. 19 Target dan Realisasi IK 18 pada Tahun 2023

Untuk mencapai tujuan dimaksud maka nelayan dan pengusaha ikan di tuntut untuk memahami prosedur dan aturan yang berlaku sebelum melakukan permohonan, agar nanti dalam proses selanjutnya berjalan lancar. Untuk mengendalikan maksud dilakukan survey pengambilan sampel pengajuan secara berkala. Keberhasilan capaian sasaran kegiatan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan system perkarantinaan, mutu dan keamanan

hasil perikanan secara professional dan partisipatif. Pada IKU ini kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi peraturan dengan target 90% pada tahun 2023 dan Terealisasi 100%.

Kegiatan pendukung dalam mencapai target indicator diantaranya :

- Melakukan kegiatan kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan
- Melakukan Sosialisasi Standar Regulasi Pemasuan dan Pengeluaran dalam Ranga Peningkatan Kepatuhan.

Sasaran Strategi 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pencapaian SS-4 digambarkan dengan 9 (Sembilan) IKU/IK yaitu

1. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Lampung.
2. Indek profesionalitas ASN,Lingkup Balai KIPM Lampung
3. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Lampung
4. Batas tertinggi temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Lamung
5. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan lingkup Kinerja Balai KIPM Lampung
6. Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Lampung
7. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Lampung
8. Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung
9. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja; Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Diharapkan dari pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan Reformasi Birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima yang berintegritas, transparan dan akuntabel dan memuaskan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk mendukung program pemerintah membangun suatu pelayanan publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotism. Data perbandingan antara target Tahun 2023 dan Realisasinya Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.19

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 20	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (Indeks)	-	75	-	-	-	75	85,97	102	120	85	100

Tabel 3. 21 Target dan Realisasi IK 19 pada Tahun 2023

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Data perbandingan antara target Tahun 2023 dan Realisasinya Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.21

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 20												
Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (Indeks)	-	-	72	73	83	84	85,97	102	120	85	100	

Tabel 3. 21 Target dan Realisasi IK 19 pada Tahun 2023

Untuk Membangun pegawai bersih dan Profesional dengan menegakan integritas.Pada Tahun 2023 Balai KIPM Lampung mempunyai target 84 pada tahun 2023 Belum ada realisasi. dan data dapat diambil dari aplikasi Ropeg.KKP.go.id di Eselon I Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Balai KIPM Lampung adalah kegiatan/proses mencocokkan kesesuaian antara aplikasi Kinerja Balai KIPM Lampung dengan hasil/lampiran yang tersedia. Guna terwujudnya IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Balai KIPM Lampung, maka Tim Pembahas/Penilai dari Biro Perencanaan – KKP ditugaskan untuk melakukan kegiatan mencocokkan kesesuaian antara aplikasi Kinerja Balai KIPM Lampung dengan hasil/lampiran yang tersedia.

Periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan. Rekonsiliasi Kinerja Internal Lingkup BKIPM Tahun 2023 diselenggarakan oleh Sekretariat Badan KIPM pada bulan Lampung 2023. Penilaian rekonsiliasi kinerja mengacu pada Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja Internal BKIPM dimana aspek penilaian meliputi 4 (empat) unsur/aspek, antara lain :

1. Aspek Kepatuhan
2. Aspek Kesesuaian
3. Aspek Ketercapaian
4. Aspek Ketepatan

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 21	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Lampung	-	-	-	85	85	85	60.89	71,63	100	85	100

Tabel 3. 21 Target dan Realisasi IK 21 pada Tahun 2023

Tahun 2023 di IKU Nilai Rekonsiliasi kinerja Satker Balai KIPM Lampung indikator ini ditargetkan 85% dan dengan realisasinya 60.89%. Realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan ketidaksesuaian data pada yang dilaporkan.

IK 22 **Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelesaian nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%) adalah batas tertinggi Temuan Keuangan Hasil LHP BPK, yang dibuktikan dengan Berita Acara LHP Tim Pembahas/Penilai dari BPK. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Balai KIPM Lampung adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap LK Balai KIPM Lampung Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2023. Sehubungan dengan realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK RI, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *Minimize* (semakin kecil lebih baik). Pengukuran kinerja IKU/IK ini dilakukan secara tahunan, pada Tahun 2023.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 22	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Lampung	-	-	-	-	100	100	100	0	0	<0,5	100

Tabel 3. 22 Target dan Realisasi IK 22 pada Tahun 2023

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan tata kelola Pemerintahan yang baik mempunyai IKU penyelesaian temuan BPK memiliki angka target pada tahun 2023 adalah 100 dan dengan realisasi 100.

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Lampung (%) adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Balai KIPM Lampung yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan dengan target selama setahun 75% rekomendasi ditindaklanjuti pada tahun 2023. Target pengukuran IKU ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2023.

Hal tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Lampung telah ditindaklanjuti sangat baik oleh mitra eselon I. Data perbandingan antara target Tahun 2023 serta Realisasi Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 23												
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	-	-	82	65	70	75	98	120	120	70	100	

Tabel 3. 23 Target dan Realisasi IK 23 pada Tahun 2023

Keberhasilan Capaian Sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU rekomendasi hasil pengawasan yang di dan sudah memanfaatkan untuk perbaikan kinerja memiliki angka target pada tahun 2023 adalah 75% dan teralisasi 98%

IK24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu : Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan Uang Persediaan, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Return SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Lampung pada Tahun 2023 ditargetkan berkategori “Baik” dengan nilai sebesar 93,75

Indikator Kinerja		Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
		2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)	-	-	93,5	93	89	93,75	93,64	99	110	89	100

Tabel 3. 24 Target dan Realisasi IK24 pada Tahun 2023

Nilai ini diperoleh dari data input dan output lingkup Balai KIPM Lampung didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung IKPA dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Dihitung saat semesteran dan akhir tahun.

IK 25

Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung
(Nilai)

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan sebagai tindaklanjut ditetapkannya Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah daerah. NKA merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Nilai diperoleh berdasarkan data input dan output yang dimasukkan oleh satuan kerja ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu. Data Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diunduh dari aplikasi SMART DJA Kemenkeu sebagai dasar capaian kinerja anggaran Balai KIPM Lampung yang akan diukur pada Tahun 2023 dengan target 82

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra 2020-2024			
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK25	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (Nilai)	-	-	-	86	81	82	85,63	104	106	81	100

Tabel 3. 25 Target dan Realisasi IK25 pada Tahun 2023

Balai KIPM Lampung telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu Kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas, IKU Nilai Kinerja Anggaran memiliki angka target pada tahun 2023 adalah 82 dan dengan realisasi 85,63.

IK 26 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%) merupakan nilai kepatuhan selama proses pengadaan Barang dan jasa selama kurun waktu satu tahun dimana datanya diambil dari Data Aplikasi SIRUP . Persentase tingkat kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah persentase kesesuaian pelaksanaan Pengadaan dengan aturan yang ditetapkan, pengukuran dengan target 77,5%.

IKU/IK ini diukur secara Tahunan sehingga pada Tahun 2023. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU ini adalah monitoring perencanaan penugasan dan evaluasi pelaksanaan PKPT.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023		Renstra 2020-2024				
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK 26												
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	-	-	-	-	75	75	78,26	100	0	75	100	

Tabel 3. 26 Target dan Realisasi IK 26 pada Tahun 2023

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan IKU tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa memiliki angka target pada Tahun 2023 adalah 77,5% dan dengan realisasi 78,26.

IK 27 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%) merupakan nilai kepatuhan selama proses pengelolaan BMN selama kurun waktu satu tahun dimana datanya diambil dari Data Aplikasi SIMAK BMN. Data perbandingan antara target Tahun 2023 dan Target serta Realisasinya Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.27.

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023		Renstra 2020-2024				
	2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kenaikan /turun terhadap Tahun 2022 (%)	Target	%	
SS4. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BKIPM di Balai KIPM Lampung												
IK27												
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BKIPM Lingkup Balai KIPM Lampung (%)	-	-	-	-	75	77,5	98,56	120	0	75	100	

Tabel 3. 27 Target dan Realisasi IK 26 pada Tahun 2023

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN memiliki angka target pada tahun 2023 adalah 77,5 % dan dengan realisasinya 98,56%.

3.1. Realisasi Anggaran Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARA(Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	1.620.720.176
2.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	600.744.522
3	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	774.515.774
	Program Dukungan Manajemen	
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8.969.892.000
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2023		11.714.414.225

Tabel 3. 27 Data Anggaran

Alokasi anggaran BKIPM pada tahun anggaran (T.A) 2023 pada DIPA Awal sebesar Rp 12.212.630.000,- .

Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 10.990.323.305,- dan PNPB sebesar Rp 724.090.920,- Pada Awal Tahun 2023 S/D Akhir Tahun 2023 dari Total anggaran. Nilai PNPB dari target awal Rp. Rp 1.100.000,000 telah tercapai Rp. 724.090.920,- atau telah tercapai 95.54 %.

URAIAN	ANGGARAN / PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN			
PNBP	1.100.000.000	724.090.920	95.54 %
JUMLAH PENDAPATAN	1.100.000.000	724.090.920	95.54 %
BELANJA			
Belanja Pegawai	6.690.276.000	6.517.153.037	97,41%
Belanja Barang	4.719.217.000	4.394.480.188	93.12%
Belanja Modal	803.137.000	802.781.000	99.96%
Belanja Bansos	0	0	0
JUMLAH BELANJA	12.212.630.000	11.714.414.225	95.92%

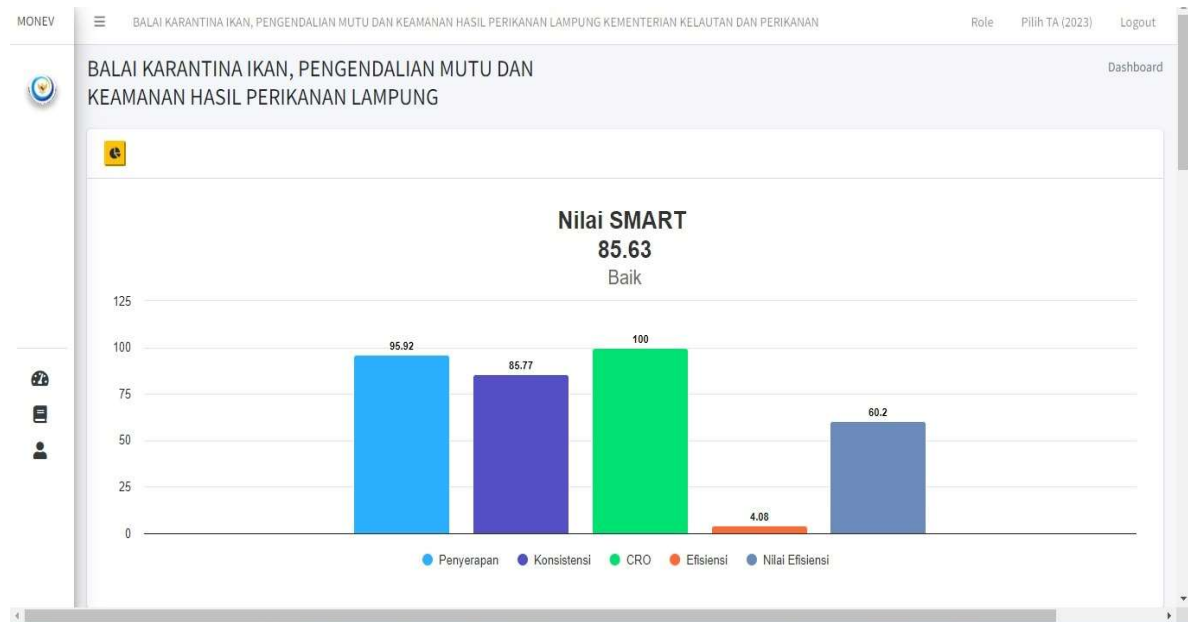
Tabel 3. 31 Realisasi Pendapatan dan Belanja Untuk Periode 31 Desember 2023

3.2. Efisiensi Anggaran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Efisiensi Belanja Bidang Kementerian / Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 seluruh lembaga diminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran.

Hal ini dilakukan untuk peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan anggaran pembangunan. Untuk itu BKIPM Lampung juga melaksanakan instruksi tersebut dengan penggunaan anggaran sehemat mungkin. Sumber penghematan bersumber dari penggunaan anggaran belanja non operasional,

Balai KIPM Lampung telah melakukan upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Disamping itu telah melakukan langkah-langkah streaming pertemuan atau sidang, dengan melakukan video conprence agar bisa melakukan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas.



C. ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN NILAI KINERJA ANGGARAN

PAGU anggaran Balai KIPM Lampung TA 2023 sebesar 12.212.630.000 Capaian realisasi anggaran Balai KIPM Lampung TA 2023 cukup baik yaitu mencapai Rp. 11.714.414.225,- atau 95,92% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.498.215.775 atau 4,08%. Secara lebih rinci, kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan data OM SPAN disajikan pada Lampiran

OM-SPAN

Realisasi Belanja Per Sumber Dana

TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN...

NO	(KODE) SUMBER DANA	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	6,690,276,000	3,986,814,000	777,637,000	0	0	0	0	0	0	11,454,727,000
		REALISASI	6,517,153,037 (97.41%)	3,695,784,268 (92.70%)	777,386,000 (99.97%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	10,990,323,305 (95.95%)
		SISA	173,122,963	291,029,732	251,000	0	0	0	0	0	0	464,403,695
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	732,403,000	25,500,000	0	0	0	0	0	0	757,903,000
		REALISASI	0 0.00%	698,695,920 (95.40%)	25,395,000 (99.59%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	724,090,920 (95.54%)
		SISA	0	33,707,080	105,000	0	0	0	0	0	0	33,812,080
GRAND TOTAL		PAGU	6,690,276,000	4,719,217,000	803,137,000	0	0	0	0	0	0	12,212,630,000
		REALISASI	6,517,153,037 (97.41%)	4,394,480,188 (93.12%)	802,781,000 (99.96%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	11,714,414,225 (95.92%)
		SISA	173,122,963	324,736,812	356,000	0	0	0	0	0	0	498,215,775

649 items 1 item selected 78,8 KB

D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TA 2023 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam setahun. Sejalan dengan ini, maka Balai KIPM Lampung telah melakukan perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja tahun 2023.

Berdasarkan data capaian kinerja dari 27 IKU/IKS yang ada, sebanyak 27(Dua Puluh Tujuh) IKU/IK telah dilakukannya. Secara umum, dari 27 IKU yang dilakukan pengukuran telah mencapai target yang ditetapkan, hasil analisis terbatas terhadap IKU/IK yang telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2023 serta dibandingkan terhadap target pada TA 2023.

E. ANALISIS PELAKSANAAN BELANJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023

Balai KIPM Lampung TA 2023 melaksanakan 4 (dua) kegiatan yaitu 1. (3987) Dukungan Manajemen Internal lingkup Badan Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp.8.969.892.000,- 2, (3988) Karantina Ikan Rp.645.601.000,- 3, (3989) Pengendalian Mutu Rp. 1.738.637.000,- dan 4, (3990) Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Rp. 858.500.000,- Sebagian besar kegiatan operasional Balai KIPM Lampung ditampung dalam 3 kegiatan sedangkan untuk Gaji dan keperluan Kantor di Lampung dalam Kegiatan Dukungan Manajemen Lingkup Balai KIPM Lampung Berikut ini disampaikan Data Perkembang Realisasi dan Sisa Anggaran Balai KIPM Lampung per Bulan S 2023.

Tabel 3.33 Perkembangan Realisasi dan Sisa Anggaran Balai KIPM Lampung per 31 Desember 2023

NO	UNIT KERJA	PAGU (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI		SIS A	
			REVISI	Rp	%	R p	%
1	Dukungan Manajemen	8.791.471.000,-	8.969.892.000,-	8.718.433.753	97.20%	251.458.247	2.80%
2	Karantina Ikan	645.601.000,-	645.601.000,-	600.744.522	93.05%	44.856.478	6.95%
3	Pengendalian Mutu	1.738.637.000,-	1.738.000.000,-	1.620.720.176	93.22%	117.916.824	6.78%
4	Standardisasi dan Kepatuhan	858.500.000,-	858.500.000,-	774.515.774	90.22%	83.984.226	9.78%
TOTAL		12.034.213.000	12.212.630.000	11.714.414.225	95.92%	498.215.775	4.08%

Data realisasi yang tertera di atas sebesar 11.714.414.225,- (Pagu) adalah data yang telah di SPJ-kan ke KPPN dan telah terbit SP2D, sehingga ada Sisa Rp. 498.215.775,-. Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan di Balai KIPM Lampung telah mencapai 95.92%.. Hal ini menunjukkan upaya pencapaian kinerja anggaran maupun kinerja organisasi yang telah ditetapkan cukup efektif dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

BAB 4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Balai KIPM Lampung Tahun 2023 antara lain :

1. Berdasarkan pengukuran oleh Tim Pengelola Kinerja Balai KIPM Lampung melalui aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Balai KIPM Lampung Tahun 2023 secara keseluruhan dinilai baik dengan skor kinerja sebesar 109,39.
2. Sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) IKU dan IK yang telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2023 ada yang telah mencapai target bahkan melebihi target dan ada yang dibawah Target yang ditetapkan.
3. Capaian realisasi anggaran Balai KIPM Lampung TA 2023 cukup baik yaitu mencapai Rp. Rp. 11.714.414.225,- atau 95.92% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 12.212.630.000,- atau **4.08%**.

B. PERMASALAHAN

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pencapaian target kinerja Level 3 Balai KIPM Lampung. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan atau kondisi yang belum sesuai harapan pada pencapaian kinerja Level 3 Balai KIPM Lampung yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja Balai KIPM Lampung:

B. LANGKAH PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan, Balai KIPM Lampung akan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan dengan seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyesuaikan agenda untuk penyelesaian target Realisasi IKU yang Sudah tercapai, serta meningkatkan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan kegiatan penanggungjawab kegiatan secara melekat

